

STRATEGI PENGENTASAN KEMISKINAN TERHADAP PENURUNAN RUMAH TANGGA MISKIN DI KOTA DENPASAR

I Nengah Kartika

Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Udayana

Email : kemuning20@gmail.com

Abstract: Poverty Reduction Strategy to Decrease The Number Of Poor Households in Denpasar. According to a report published by Denpasar Government , the number of poor households (RTM) in Denpasar experienced a decline in 2010 compared with 2006. The problem is whether and how far the program / poverty reduction strategies defined and followed up by the Government of Denpasar. In this study, data were collected by interview and observation. The results showed that the number of RTM declined during 2007-2011, but still left some RTM of the total population of Denpasar. Most of the existing RTM welfare states because of government assistance in the form of goods, home improvement, scholarships, JKBM, or other assistance. Some aid programs can not be developed further by the recipient because of resource constraints.
Keywords: poverty reduction and poor households

Abstrak: Strategi Pengentasan Kemiskinan Terhadap Penurunan Rumah Tangga Miskin Di Kota Denpasar. Berdasarkan laporan kependudukan yang diterbitkan oleh pemerintah Kota Denpasar, jumlah Rumah tangga miskin (RTM) di Denpasar mengalami penurunan jumlah pada tahun 2010 dibandingkan dengan tahun 2006. Masalahnya adalah apa dan sejauhmana program/strategi pengentasan kemiskinan ditetapkan dan ditindak lanjuti oleh Pemerintah Kota Denpasar. Pada penelitian ini, data dikumpulkan dengan metode wawancara dan observasi. Hasil riset menunjukkan bahwa jumlah RTM menurun selama tahun 2007-2011, tapi masih tersisa RTM dari keseluruhan populasi di Kota Denpasar. Sebagian besar RTM menyatakan ada peningkatan kesejahteraan karena bantuan pemerintah baik berupa barang, perbaikan rumah, beasiswa, JKBM, maupun bantuan lainnya. Beberapa program bantuan tidak bisa dikembangkan lebih lanjut oleh RTM penerima karena keterbatasan sumber daya.

Kata kunci : penurunan kemiskinan dan rumah tangga miskin.

PENDAHULUAN

Brendley (Alfinn, 1980) kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk mendapatkan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sosial yang terbatas, dan sejalan dengan pendapatnya. Sedangkan Sharp, et al (Kuncoro, 2006) mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi. *Pertama*, secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. *Kedua*, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. *Ketiga*, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam memperoleh permodalan. Ketiga penyebab kemiskinan ini bermuara dari teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*). Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima.

Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada rendahnya kesempatan kerja dan menimbulkan pengangguran dan seterusnya. Logika berpikir ini dikemukakan oleh Ragnar Nurkse mengatakan bahwa, *"a poor country is poor because it is poor..."*

Menurut Baswir, (1997: 23), dan Sumarjan. (1993) secara sosioekonomis, terdapat dua bentuk kemiskinan, yaitu pertama, kemiskinan absolut, adalah suatu kemiskinan di mana orang-orang miskin memiliki tingkat pendapatan di bawah garis kemiskinan, atau jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, kebutuhan hidup minimum antara lain diukur dengan kebutuhan pangan sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan, kalori, GNP perkapita, pengeluaran konsumsi dan lain-lain. Dan kedua, kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang dilihat berdasarkan perbandingan antara suatu tingkat pendapatan dengan tingkat

pendapatan lainnya. Contohnya, seseorang yang tergolong kaya (mampu) pada masyarakat desa tertentu bisa jadi yang termiskin pada masyarakat desa yang lain. Sedangkan menurut Kartasasmita (1997: 235) dan Baswir (1997: 23) bentuk-bentuk kemiskinan yang sekaligus menjadi faktor penyebab kemiskinan yaitu: (1) Kemiskinan natural, (2) Kemiskinan kultural, dan (3) Kemiskinan struktural.

Kondisi umum di Kota Denpasar menunjukkan bahwa jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) di pada tahun 2006 sebanyak 4.159 RTM (sesuai dengan SK Walikota Denpasar Nomor 188.45/101.A/HK/2006), dan menurun menjadi 4.101 RTM pada tahun 2007 serta terus mengalami penurunan menjadi 2.889 RTM pada tahun 2010. Strategi penanggulangan kemiskinan di Kota Denpasar diarahkan pada keberpihakan Pemerintah Kota Denpasar terhadap masyarakat miskin.

Sesuai dengan kerangka koordinasi tersebut, maka pemerintah daerah menindak lanjuti dengan menyusun dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah (SPKD), melaksanakan dan mendukung program-program nasional penanggulangan kemiskinan, serta melaksanakan program - program penanggulangan kemiskinan daerah yang sesuai dengan kondisi lokal seperti PNPM, bedah rumah, kredit tanpa agunan, pelatihan keterampilan kecakapan hidup, penguatan usaha kecil, bantuan sosial, bantuan kesehatan, dan berbagai program pemberdayaan kemiskinan lainnya yang bertumpu pada komunitas setempat yang menggunakan potensi sosial lokal untuk membantu orang miskin terbebas dari lingkaran kemiskinannya (*community based development*).

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dikemukakan pokok permasalahan adalah: sejauhmana strategi yang ditetapkan serta program pengentasan kemiskinan mampu ditindak lanjuti oleh Pemerintah Kota Denpasar.

Sedangkan tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah : tersusunnya data dan informasi capaian program serta respon masyarakat terhadap upaya-upaya penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan oleh berbagai dinas/ instansi/ SKPD di lingkungan Pemerintah Kota

Denpasar selama kurun waktu lima tahun terakhir dalam kegiatan menetapkan strategi penanggulangan kemiskinan di Kota Denpasar.

KAJIAN PUSTAKA

Konsep Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu masalah kekurangan. Kemiskinan bisa diartikan sebagai suatu keadaan seseorang atau keluarga yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya karena serba kekurangan. Kemiskinan adalah suatu permasalahan yang multidimensi serta kompleks, sehingga pengertian/definisi kemiskinan sangat beragam sesuai evolusi ilmu pengetahuan maupun ilmu sosial.

BPS mengartikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makan maupun non makanan Standar minimum itu diwujudkan dalam bentuk suatu garis kemiskinan (*poverty line*). Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui berapa banyak masyarakat miskin atau orang yang tingkat konsumsinya di bawah garis kemiskinan. (Maksum, 2004).

Dari definisi tersebut, kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua yakni absolut dan relatif. Kemiskina absolut didefinisikan sebagai mencapai standar kehidupan yang minimal 9 sandang, pangan dan papan). Tentunya disesuaikan dengan kebutuhan standar di setiap negara. Di sisi lain, kemiskinan relatif didefinisikan sebagai ketidakmampuan mencapai standar kebutuhan kontemporer, yang diasosiasikan dengan tingkat kesejahteraan rata-rata atau pendapatan rata-rata masyarakat pada saat itu.

Studi-studi Sebelumnya

Sudah banyak studi kemiskinan yang dilakukan di Indonesia. Semenjak periode 1970-an dengan studi kemiskinan milik Singarimbun dan Penny (1976) yang mengangkat kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yakni Desa Sriharjo. Studi tersebut berhasil membangun suatu kesadaran tentang masalah kemiskinan di perdesaan yang mempunyai dimensi kompleks baik ekonomi, sosial, maupun kependudukan. Sementara itu, pada dekade 1980-an Arief dan Sasono (1981) yang lebih melihat kemiskinan sebagai dampak dari keterpinggiran negara menghadapi negara-

negara besar yang melakukan praktik neo kolonialisme.

Studi kemiskinan pada fase berikutnya terjadi pada dekade 1990-an dimana era di mana program penanggulangan kemiskinan yang lebih terfokus, terutama dengan semakin banyaknya bantuan luar negeri. Sumadiningrat (1990) menganalisis beberapa program penanggulangan kemiskinan seperti Program Instruksi Presiden (Inpres) dan Program Pengembangan Kawasan Terpadu (PKT). Studi dari Sumadiningrat tersebut secara umum menyimpulkan bahwa program-program dari pemerintah tersebut sudah berhasil mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat Indonesia.

Studi yang paling banyak mengulas masalah kemiskinan terjadi pada fase setelah krisis ekonomi pada tahun 1997. Studi-studi tersebut memiliki fokus bahasan yang sangat beragam. Namun studi-studi yang dilakukan masih seputar masalah-masalah perhitungan kemiskinan seperti yang dilakukan Alisjahbana dan Yusuf (2003) yang menggunakan pendekatan deskriptif pada masa krisis. Ada pula studi yang memfokuskan pada faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Indonesia yaitu studi yang dilakukan oleh Balisacan et.al (2003). Terdapat beberapa temuan penting yang digaribawahi yaitu, (1) peningkatan modal manusia (sumber daya manusia/SDM) akan mengurangi kemiskinan. Dengan kata lain, investasi di bidang pendidikan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan otomatis akan mengurangi kemiskinan, (2) perkembangan teknologi akan meningkatkan pertambahan pendapatan dan akan mengurangi angka kemiskinan, (3) sektor keuangan tidak memiliki dampak terhadap kemiskinan karena sebagian besar masyarakat miskin di perdesaan tidak mampu memanfaatkan keberadaan bank atau koperasi yang terdapat di desa dan (4) kepemilikan terhadap minyak dan gas akan mengurangi kemiskinan secara tidak langsung.

METODE PENELITIAN

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan terstruktur, ke masing-masing wilayah studi dengan berpatokan pada *desk research* yang

telah dilakukan melalui sumber-sumber data sekunder. Data program yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan di Kota Denpasar dan capaian program akan dikumpulkan dari masing-masing SKPD dan dari berbagai sumber yang relevan dan akurat sebagai data awal yang dikategorikan berdasarkan atas jenis programnya. Sedangkan untuk memperoleh informasi dampak program terhadap RTM dilakukan survey dengan menggunakan kuesioner terstruktur terhadap RTM dengan metode sampling. Jumlah sampel/responden yang diteliti di masing-masing Desa/Kelurahan sebanyak 10 Responden yang dipilih secara acak dari RTM yang ada di wilayah tersebut. Adapun jumlah sampel/responden adalah sebanyak 440 orang yang dipilih dan bersedia sebagai responden.

Analisis Data

Data primer yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan teknik *cross tab* dan ditampilkan dalam bentuk persentase. Hasil tersebut yang digunakan dalam menjelaskan apa yang diperoleh dari wawancara dengan responden. Data sekunder berupa data *time series* dan *cross section* yang dikumpulkan dari berbagai sumber data selanjutnya dianalisis secara deskriptif, untuk menggambarkan tentang capaian masing-masing program. Data primer yang dikumpulkan dari lapangan di masyarakat akan di analisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran kondisi kesejahteraan sosial masyarakat miskin yang diamati meliputi profil fisik dan sosial-ekonomi, isu dan permasalahan di masing-masing wilayah yang diamati.

Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk data numerik, data deskriptif yang bersifat kuantitatif dan kualitatif selanjutnya disajikan secara informatif sesuai dengan kaedah ilmiah dalam bentuk laporan Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Denpasar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadaan RTM Kota Denpasar

Denpasar sebagai salah satu pusat kota tidak terlepas dari permasalahan penduduk miskin, Pada tahun 2006 berdasarkan hasil PSE 2005, jumlah RTM di Kota Denpasar mencapai 4.159 RTM dari 100.256 RT, dengan jumlah penduduk

mencapai 17.204 jiwa. Jumlah ini terus mengalami penurunan secara signifikan mencapai 30,54% selama kurun waktu 2006-2010. Pada tahun 2010 jumlah RTM di Kota Denpasar masih menyisakan 2.889

RTM dengan jumlah penduduk miskin 11.423 jiwa. Adapun secara rinci perubahan jumlah RTM di Kota Denpasar tahun 2006 dan tahun 2010 disajikan di Tabel 1

Tabel 1
Perbandingan Rumah Tangga Miskin Kota Denpasar Tahun 2006 dan 2010

No	Kecamatan	RTM 2006	RTM 2010	Penurunan	Persentase Penurunan RTM
1	Denpasar Selatan	932	458	474	50.86
2	Denpasar Barat	933	720	213	22.83
3	Denpasar Timur	923	639	284	30.77
4	Denpasar Utara	1371	1072	299	21.81
	Total Kota Denpasar	4159	2889	1270	30.54

Sumber: Bappeda Kota Denpasar 2011

Program Penanggulangan Kemiskinan Kota Denpasar

Berdasarkan atas hasil PSE 2005, jumlah penduduk miskin tahun 2006 di Kota Denpasar yang terdiri dari 4 kecamatan, sebanyak 17.184 jiwa dari jumlah penduduk seluruhnya 488.017 jiwa (mencapai 3.5% dari total jumlah penduduk). Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak adalah Kecamatan Denpasar Utara, yaitu 6.185 jiwa atau 30% dari total penduduk miskin, atau 5.6% dari total penduduk Kecamatan Denpasar Utara.

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Kota Denpasar melalui pembiayaan APBD telah melaksanakan berbagai program yang menyentuh/terkait dengan masyarakat atau penduduk miskin. Kebijakan program pembangunan Kota Denpasar dalam usaha penanggulangan kemiskinan mulai tahun 2007 adalah lebih diarahkan mempercepat pertumbuhan dan memperkuat ketahanan ekonomi melalui sistem ekonomi kerakyatan (*economic stability*). Pilihan ini dilakukan untuk memberikan landasan yang kuat sebagian besar masyarakat dalam hal ini khususnya adalah masyarakat Kota Denpasar dalam berbagai kegiatan ekonomi yang dilakukan. Tujuannya adalah mempercepat pertumbuhan dan memperkuat ketahanan ekonomi melalui sistem ekonomi kerakyatan untuk mewujudkan

kan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi yang semakin meningkat dengan berbasis pada ekonomi kerakyatan guna memberikan dampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, mengurangi pengangguran dan yang pada akhirnya mengurangi kemiskinan.

Adapun program-program yang di laksanakan pada tahun 2007 untuk memperkuat ketahanan masyarakat seperti: (1). Program peningkatan pendidikan dasar dan menengah terutama bagi anak putus sekolah, tidak mampu melanjutkan dengan menyelenggarakan pendidikan kejar paket A, B, dan C; (2). Memberikan beasiswa kepada siswa kurang mampu setingkat, SD, SMP dan SMU; (3). Penyelenggaraan pendidikan nonformal bagi anak tidak sekolah, atau putus sekolah dan tidak mampu melanjutkan dengan memberikan pengentasan kebutaaksaraan; (4). Perbaikan gizi masyarakat dan pencegahan berbagai penyakit manular lainnya guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama masyarakat miskin pedesaan melalui pemberian makanan tambahan dan vitamin serta program operasi beras murah bagi masyarakat miskin; dan (5). Peningkatan kesejahteraan keluarga dan perempuan di pedesaan, serta program penguatan kelompok tani dan nelayan. Mengenai jumlah anggaran Program kemiskinan dapat disajikan di Tabel 2.

Tabel 2
Jumlah Anggaran Program Kemiskinan di kota Denpasar 2007-2011

No	Tahun anggaran	Jumlah Anggaran Program Kemiskinan	Total APBD	Persentase Jumlah Anggaran Program Kemiskinan terhadap APBD
1	2007	3,250,439,000	323,598,708,664	1.00
2	2008	3,660,461,000	253,603,705,916	1.44
3	2009	6,752,865,255	355.529.767.765	1,90
4	2010	6.720.665.090	379.879.018.095	1,77
5	2011	8,099,807,134	420,221,866,152	1,93

Sumber : Bappeda Kota Denpasar, 2011

Selanjutnya tahun 2008 program lebih diarahkan pada pemberdayaan dan pelatihan untuk membentuk dan meningkatkan kemauan untuk bangkit dalam bidang perekonomian. Hal ini dapat dilihat dari beberapa program pokok penanggulangan kemiskinan tahun 2008 seperti: (1). Program Wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, dan pendidikan menengah dengan kegiatan penyelenggaraan ujian paket A, B, dan C; (2). Pengembangan pendidikan non formal dan pendampingan buta aksara; (3). Program pemberian beasiswa tetap berlanjut guna meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pendidikan formal; (4). Program perbaikan gizi masyarakat; (5). Program pemberdayaan kesejahteraan sosial masyarakat seperti: Bantuan pengembangan kelompok usaha bersama anak nakal, Pengembangan dan pemberdayaan usaha ekonomi Desa (UED), Pembinaan TTG, peningkatan produksi pertanian/perkebunan dan Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap; dan (6). Program perlindungan sosial seperti: Pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat, peningkatan pelayanan lansia, dan Pelayanan pemeliharaan kesehatan sulinggih.

Program yang telah berhasil di tahun 2009, dilanjutkan pada tahun 2010 dengan fokus program penanggulangan kemiskinan diarahkan pada perlindungan dan peningkatan ketahanan ekonomi kerakyatan. Adapun program tersebut anatar lain: (1). Peningkatan pendidikan masyarakat miskin dengan program beasiswa, bantuan pendidikan non formal; (2). Perbaikan gizi masyarakat dan penyehatan lingkungan; (3).

Bantuan perbaikan rumah bagi RTM; (4). Peningkatan produktivitas tenaga kerja; (5). Penguatan kelembagaan petani, dan (6). Perlindungan sosial kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun 2011 program penanggulangan kemiskinan Kota Denpasar difokuskan pada penguatan dan pemberdayaan masyarakat miskin serta perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. Program pemberdayaan ini meliputi pelatihan tenaga kerja, sehingga diharapkan masyarakat miskin lebih mampu mengakses bursa kerja serta mampu untuk membuka usaha mandiri. Program lainnya adalah peningkatan kesejahteraan keluarga dengan pemberdayaan PKK, dan potensi RTM di Kota Denpasar. Program yang telah sukses dilaksanakan seperti bantuan beasiswa, jaminan kesehatan, dan perbaikan rumah tetap dilaksanakan. Adapun program kemiskinan di tahun 2011 disajikan pada tabel berikut.

Indikasi Dampak Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Berbagai program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kota Denpasar secara umum telah menunjukkan hasil penurunan RTM secara signifikan mencapai 30,54% selama kurun waktu 2006-2010, namun masih menyisakan 2.889 RTM dengan jumlah penduduk miskin 11.423 jiwa. Hasil survey terhadap RTM di Kota Denpasar dengan sampel 440 RTM, diketahui bahwa berbagai program penanggulangan kemiskinan yang telah diterima oleh masyarakat RTM seperti disajikan di Tabel 3.

Tabel 3
Bantuan Yang Telah Diterima Oleh RTM

No	Bantuan yang pernah diterima Responden	Jumlah Responden	Persentase
1	SLT/BLT	89	20,23%
2	Raskin	428	97,27%
3	JKBM	255	57,95%
4	Bedah rumah	178	40,45%
5	Pelatihan	16	3,64%
6	Modal usaha	19	4,32%
7	Beasiswa	30	6,82%
8	Ternak	20	4,55%
9	Alat usaha	6	1,36%
10	Lainnya	17	3,86%

Sumber : Data diolah dari hasil penelitian 2011

Tabel 3 menunjukkan bahwa hampir seluruh RTM sudah mendapat bantuan raskin, namun masih ada RTM belum mendapat jatah raskin, hal ini kemungkinan terjadi karena adanya perkembangan data RTM atau belum terdatanya RTM yang bersangkutan dalam daftar penerima raskin. Dengan adanya program penanggulangan

kemiskinan yang melibatkan peran serta RTM maupun masyarakat lainnya, telah mampu meningkatkan peran serta atau partisipasi RTM dalam program penanggulangan kemiskinan seperti meningkatnya partisipasi masyarakat seperti disajikan di Tabel 4

Tabel 4
Bentuk Partisipasi RTM dalam Program Bantuan

No	Bentuk Partisipasi Dalam Program Bantuan	Jumlah	Persentase
1	Penerima Saja	301	68,41%
2	Ikut Proses	9	2,05%
3	Ikut Rapat	96	21,82%
4	Ikut Tambah Modal	1	0,22%
5	Terlibat Aktif Dlm Program	33	7,50%
Jumlah Responden		440	100,00%

Sumber: Data diolah dari hasil penelitian tahun 2011

Tabel 4 menunjukkan bahwa sebagian besar RTM hanya sebatas penerima bantuan saja, hal ini disebabkan karena bantuan yang mereka terima sebagian besar hanya berupa jatah raskin, namun yang menarik dalam penerima bantuan RTM mengaku ikut rapat menentukan bantuan sebanyak 96 orang (21,82%) dan mampu menambah/mengembangkan modal usaha yang diberikan 1 orang dan terlibat aktif dalam program 33 orang (7,50%).

Dampak dari adanya program bagi RTM sebagian besar RTM (77%) mengaku telah ada peningkatan status kesejahteraan keluarga karena adanya bantuan raskin,

bantuan perbaikan rumah, bantuan beasiswa, bantuan JKBM, dan bantuan lainnya. Program bantuan yang telah diterima oleh RTM ternyata sebagian besar belum mampu dikembangkan lebih lanjut oleh RTM karena keterbatasan berbagai sumber daya, dari hasil kuesioner diketahui bahwa 75,91% belum mampu mengembangkan bantuan dengan baik guna peningkatan perekonomian keluarga, sisanya sebanyak 24,09% mampu mengembangkan bantuan dengan baik. Begitu pula sebagian besar RTM mengaku bantuan yang mereka terima belum mampu meningkatkan motivasi mereka untuk berusaha di sektor ekonomi

produktif guna meningkatkan pendapatan keluarga. Namun 36,82% mengaku sudah mampu meningkatkan motivasi mereka dalam berusaha di sektor ekonomi produktif.

SIMPULAN

Pertama, perlindungan sosial masyarakat miskin (*social protection*), dilaksanakan melalui program: perbaikan gizi masyarakat; pencegahan dan penanggulangan penyakit menular; pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial termasuk penyandang cacat dan trauma; pembinaan para penyandang cacat dan trauma; peningkatan pelayanan kesehatan lansia dan pembinaan panti asuhan/panti jompo; peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak; program Keluarga Berencana; peningkatan penanggulangan narkoba, PMS, termasuk HIV/AIDS; peningkatan ketahanan pangan (Operasi pasar khusus beras untuk rakyat miskin dan bantuan raskin); dan program bantuan langsung tunai (BLT)

Kedua, pemberdayaan masyarakat miskin (*poor community empowerment*), dilaksanakan melalui program: pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan PMKS; peningkatan peran perempuan di pedesaan; pengembangan perumahan; Pemberdayaan Komunitas Perumahan Masyarakat (P2KP); peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan; peningkatan produksi pertanian/perkebunan; pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial; pemberdayaan potensi RTM di Kota Denpasar;

Ketiga, pengembangan kemampuan (*capacity building*), dilaksanakan melalui program: wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal; peningkatan kesejahteraan petani (Peningkatan pendapatan kelompok petani kecil, pelatihan petani dan pelaku agribisnis, peningkatan lembaga petani, pengelolaan lahan dan airirigasi); pengembangan perikanan tangkap (Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap); peningkatan pelayanan anak Balita (Pelatihan dan pendidikan prawatan anak Balita); pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial (Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat); peningkatan partisipasi masyarakat (Pembinaan TTG); monitoring dan evaluasi usaha ekonomi

desa (UED); pelayanan komunikasi informasi dan edukasi; penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan dan produktivitas lahan tidur; dan pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan.

Keempat, penciptaan peluang kerja (*creating opportunity*), dilaksanakan melalui program: peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja; pengembangan ekonomi pedesaan; peningkatan dan produktivitas tenaga kerja; pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial (Pelatihan tenaga kerja sosial masyarakat); dan pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin.

Kelima, pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan. Secara umum pelaksanaan program sudah baik. Sebagian besar penerima bantuan mengaku telah memanfaatkan bantuan tersebut dengan baik, hanya sebagian kecil yang belum mampu memanfaatkan berbagai program dengan baik. Di sisi lain, sebagian besar penerima bantuan mengaku belum mampu mengembangkan bantuan dengan baik guna peningkatan perekonomian keluarga, hanya sebagian kecil yang mengaku sudah mampu meningkatkan motivasi mereka dalam berusaha di sektor ekonomi produktif. Secara keseluruhan tanggapan RTM menyatakan bahwa program kemiskinan sudah cukup baik dan diteruskan tapi penerima bantuan juga menyatakan perlu ada perbaikan seperti sosialisasi dan pemerataan serta bantuan lebih banyak karena masih belum memenuhi kebutuhan minimum mereka.

Keenam, dampak Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Kota Denpasar. Hasil kuesioner terhadap 440 RTM menunjukkan bahwa program penanggulangan yang telah dilaksanakan memberikan perubahan terhadap karakteristik kemiskinan RTM Kota Denpasar. Hal ini dapat dilihat dari kepemilikan barang berharga seperti sepeda motor, TV dan barang lainnya seperti radio, dan logam mulia. RTM juga merasakan adanya peningkatan kesejahteraan setelah adanya program. Hal ini karena adanya program langsung seperti perbaikan rumah, beasiswa, JKB, sehingga pembiayaan tersebut dapat digunakan untuk peningkatan kesejahteraan. Pemanfaatan PLN untuk penerangan rumah juga sudah cukup tinggi dengan klasifikasi PLN sambungan sendiri dan masih ikut dengan sambungan lain.

Kepemilikan fasilitas MCK (mandi, cuci, kakus) juga cukup baik karena sudah menggunakan WC sendiri. Tingkat penghasilan RTM sebagian besar antara Rp 500.000 sampai Rp 1.000.000 per bulan, hal ini sudah rata-rata mendekati 1\$ per kapita per hari. Kondisi rumah RTM tidak layak huni adalah sebesar 41,65% dan cukup layak huni 58,35%. Lantai rumah RTM sudah disemen (68,64%) sedangkan sisanya hanya 9,32% masih lantai tanah. Kepemilikan tanah maupun rumah dengan status milik sendiri 51,37%, milik keluarga 22,83 % dan yang masih ngontrak sebesar 18,04%. Kondisi lingkungan rumah RTM secara umum masih sebagian besar antara kumuh sampai sangat kumuh (69,41%). Pendidikan terakhir atau pendidikan paling tinggi RTM sebagian besar (71,82%) adalah tidak tamat SD dan tamat SD. Sudah menggunakan pelayanan kesehatan Puskesmas (92,73%).

REFERENSI

- Alfinn, Mely G. Tan, dan Soemardjan. 1980. Kemiskinan Struktural Suatu Bunga Rampai. Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, Jakarta
- Alisjahbana, Armida S dan Arief Anshory Yusuf. 2003. Poverty Dynamics in Indonesia: Preliminary Evidence from Longitudinal Data. The 5th IRSA International Conference, July 18-19, Bandung.
- Arief, Sritua dan Adi Sasono. 1981. *Indonesia: Ketergantungan dan Keterbelakangan*. Jakarta: Lembaga Studi Pembangunan.
- Balisacan, Arsenio M, Ernesto M. Pernia dan Abuzar Asra. 2003. Revisiting Growth and Poverty Reduction in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 39(3), December, pp.329-353.
- Baswir, revrisond.2004. *Drama Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta : Kreasi Wacana
- Kuncoro, mudrajad. 2006 . *Ekonomika Pembangunan : Teori dan masalah Kebijakan*. Yogyakarta : YKPN
- Kartasmita, Ginandjar. 1997. *Administrasi Pembangunan: Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta: LP3ES
- Maksum, Choiril. 2004. Official Poverty Measurement in Indonesia. *Paper Presented 2004 International Conference on Official Poverty Statistics*, Mandaluyong City, Philippines, 4-6 October.
- Singarimbus, Masri dan David Penny. 1976. *Penduduk dan Kemiskinan: Kasus Sriharjo di Pedesaan Jawa*. Jakarta: Bhratara Karya Aksara.
- Sumadiningrat, Gunawan. 1990. *Pemerataan Pembangunan*. Makalah disampaikan pada Kongres ISEI ke XI, Bandung, 22-25 Agustus.
- Sumarjan. 1993. Sumardjan, Selo. 1993. Kemiskinan (Suatu Pandangan Sosiologis). Makalah, Jakarta.